

PENGARUH TIMBAL BALIK PERKEMBANGAN LINGKUNGAN/TATA RUANG PERKOTAAN DAN SEKITARNYA

Widharyatmo

Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret

Abstract

The very rapidly city development and growth is frequently not balanced with the speedy of wholly and precisely environment planning, so that damage or inconvenience will occur later. It requires the improvement or maintenance of environment needing higher effort and cost. We see, for example, the building condemnation for road widening, building disassembly in the area not consistent with the allotment, as well as a variety of interest conflict. In addition, the development expanding to outside administrative area brings about many effects and aspects that should be coped with jointly. The inter-area layout completion is not easy. It requires a long-term thinking, cooperation between the areas including many sectors such as geography, demography, job opportunity & labor force, education and improvement of society's legal awareness in integrated and sustainable manner.

Keywords: lay out, environment, area

PENDAHULUAN

Telah kita ketahui bersama bahwasanya pertumbuhan penduduk telah terjadi hampir di seluruh dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kota yang sulit dihentikan, sebagai akibat dari peningkatan permintaan atas fasilitas kehidupan manusia, seperti lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, permukiman, dan lain sebagainya. Kota sebagai pusat aktifitas manusia, lebih memiliki kemampuan dalam menyediakan berbagai fasilitas dibanding desa. Demikian pula halnya dengan negara kita : Indonesia. Sejalan perkembangan kota, semakin meningkat dinamika dan aktifitas penghuninya. Dengan meningkatnya aktifitas tersebut sesungguhnya semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan di kota.

Sumberdaya terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kota, adalah tempat berkumpulnya manusia manusia berkualitas. Tetapi dalam hal sumber alam, perkotaan dapat dikatakan sangat miskin. Kebutuhan pangan bagi masyarakat kota disediakan oleh kawasan desa desa di sekitarnya, walaupun impor, sumber pangan di negara asalnya juga dari perdesaan. Bahan bakar, tenaga listrik sebagian besar juga disediakan dari luar kota. Demikian pula dengan sumber daya ruang, perkotaan sangat terbatas.

Masalah

Peningkatan kebutuhan akan lahan semakin meningkat, akibat dari penambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktifitasnya. Penambahan luasan lahan perkotaan tidak dapat dilakukan, desakan ke arah luar kota tak terhindarkan. Perkembangan sekitar kota, dapat merugikan keadaan kota itu sendiri, misalnya hilangnya resapan air yang menyebabkan banjir di kota, kesemrawutan transportasi, dan mungkin juga kesulitan kesulitan administrasi kependudukan dan lain lain.

Masalah ruang di perkotaan semakin lama semakin rumit dan semakin mahal harganya, karena konflik kepentingan dari berbagai pihak yang pada umumnya berkisar pada masalah ekonomi (sumber kehidupan) yang dapat berbias pada masalah politik dan lain-lain.

KAJIAN

Pemanfaatan sumber daya lahan atau ruang berkembang dengan cepat di daerah perkotaan yang pada umumnya mempunyai lahan yang terbatas. Penataan penggunaannya terasa sangat sulit, karena tekanan terhadap lahan meningkat sesuai dengan peningkatan kebutuhan dan aktifitas manusia. Sumber daya lahan yang terbatas dapat menjadi pemicu timbulnya persaingan dan konflik penggunaan. Berdasarkan persaingan tersebut, muncul ketidak-sesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga muncul berbagai dampak lingkungan. Semua pembangunan akan mempunyai dampak, besar maupun kecil dalam banyak aspek (Chafid Fandeli, 1988).

Kualitas lingkungan berkaitan erat dengan masalah artistik, kesehatan penduduk, tata pemanfaatan ruangnya, serta baku mutu lingkungan. Lingkungan hidup manusia semakin lama semakin terasa sempit karena dinamisnya kehidupan manusia, semakin intensif dan ekstensif penggunaan atau pengolahan berbagai sumber daya alam; seperti sandang, pangan, dan energi. Kemerosotan mutu lingkungan di perkotaan juga diakibatkan oleh menyusutnya ruang terbuka hijau, (Endes N. Dahlan, 1992).

Permasalahan lingkungan berkembang pada dimensi yang tak terbatas; baik bidang keilmuan, ruang maupun waktu, sehingga perlu pemikiran dan penanganan lebih serius.

Dalam masalah lingkungan hidup dan permukiman manusia, kondisi atau penampilannya sering merupakan pencerminan budaya, sosial, maupun ekonomi penghuninya. Karya manusia yang diwujudkan dalam penampilan lingkungan dan permukimannya, merupakan resultan dari banyak aspek yang terkait. Aspek dominanlah yang akan tercermin dalam tampilan lingkungan tersebut, yang tidak hanya dalam desain akhir, tetapi juga tergantung pada pola hidup masyarakat. Dinamika kehidupan manusia setiap saat akan mengubah lingkungan hidupnya; disebabkan oleh perubahan pola hidup, peningkatan sosial ekonomi, atau mungkin rusak dan bencana.

Dalam perancangan lingkungan hidup maupun kawasan permukiman, memang aspek teknis sangat penting, tetapi masalah non teknis tidak kalah penting dan bahkan sering lebih besar peranannya sebagai penentu hasil perancangannya, misalnya faktor ekonomi, keadilan sosial, dan budaya.(Widianarko, 1998). Disamping itu juga dipengaruhi pula oleh pengalaman atau pengaruh dari luar pada para pelaku kegiatan pengembangan lingkungan.

Secara radial muncul bermacam-macam lingkungan binaan manusia dengan berbagai fungsi, tergantung pada kepentingan dengan latar belakang yang beraneka ragam. Perkembangan pesat telah banyak menimbulkan permasalahan yang pada umumnya bermuara pada kemerosotan mutu lingkungan hidup, misalnya menurunnya kualitas air, udara, kenyamanan, keindahan, sampai pada masalah ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian secara teoritis dalam aspek teknis, lingkungan hidup, maupun arsitektural, pada prinsipnya cukup mudah diselesaikan; tetapi kenyataan dalam penanganannya sulit atau bahkan tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali bila menyentuh akar permasalahan yang ternyata sangat kompleks, berkisar pada aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, termasuk pula masalah politik.

Sebagai contoh, kota Surakarta masih mempunyai kecenderungan untuk terus tumbuh dan berkembang, namun perkembangannya sering kurang terkendali sehingga terjadi kemerosotan kualitas lingkungan dan kehilangan makna filosofis sebagai kota budaya yang seharusnya dipertahankan. Keberadaan dan keselamatan lingkungan kota sangat penting artinya bagi semua lapisan masyarakat maupun generasi penerusnya. Makna filosofis atau karakter lingkungan spesifik dan kualitas yang bagus dapat menumbuhkan kecintaan serta kebanggaan bagi masyarakatnya.

Di dalam *Monumenten Ordonantie 1931*, pada bagian pembukaannya juga telah ditetapkan bahwa perlu perlindungan terhadap benda yang mempunyai nilai penting bagi pra sejarah, sejarah, kesenian, atau paleoanthropologi; sedang pada Pasal 1 dijelaskan bahwa benda-benda yang dimaksud adalah benda atau bagiannya, baik yang bergerak atau tidak bergerak, termasuk tanah dan unsur-unsur lingkungannya, dan berumur sedikit-dikitnya 50 tahun.

Telaah tentang masalah permukiman dan tata ruang kota, misalnya di Surakarta telah banyak dilakukan, baik dengan titik berat pelestarian bangunan

bersejarah, pengendalian pertumbuhan kota, dan masalah mendesak lain seperti masalah pedagang kaki lima, serta masalah lalu lintas. Tindak lanjut dari kajian-kajian tersebut diatas kebanyakan tidak efektif untuk menyelesaikan masalahnya, karena banyak kendala yang menghadang. Kendala dominan adalah terbatasnya dana dari pemerintah atau pihak lain yang terkait, dan pemerintahan yang sering berganti penguasa maupun kebijakannya yang tidak sinkron atau berkelanjutan.

Banyak konflik yang terjadi dalam penataan lingkungan, dari masalah perorangan, kriminal sampai penafsiran hukum. Di samping itu semakin banyak pihak yang terlibat, yaitu para pelaku kegiatan atau penghuni dan pemakai di wilayah tersebut, baik penduduk setempat maupun pendatang. Mereka perlu untuk tidak diperlakukan sebagai obyek, tetapi harus digali dan dimengerti aspirasi maupun latar belakangnya.

Permasalahan lingkungan kota lebih meningkat lagi dalam era reformasi dewasa ini, gejala dalam masyarakat berkembang lebih cepat, sulit dibendung dan dikendalikan, banyak konflik yang menjadi kabur kebenarannya bila ditinjau dari sisi hukum atau hak asasi manusia. Kalau persoalan yang ada tidak segera diselesaikan, maka semakin sulit diperbaiki dan akan menimbulkan beban lingkungan yang semakin berat untuk generasi penerus dimasa depan.

Perlu dipertimbangkan pula bahwa dalam penataan lingkungan di kota Surakarta terkandung unsur usaha konservasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti disebutkan bahwa Kraton Kasunanan Surakarta dan Masjid Kauman, adalah bangunan kuno bersejarah yang harus dilindungi sebagai cagar budaya. (Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta Selatan tahun 1993 – 2013, Rencana: III-8). Selain itu juga terdapat beberapa komponen lain yang perlu dilindungi, termasuk unsur budaya maupun adat istiadat serta tradisi yang unik dan potensial untuk mendatangkan devisa (Sidharta, Eko Budihardjo, 1989: 5).

Penyebaran permukiman di luar kota juga sering menimbulkan kerusakan lingkungan di perdesaan, misalnya penurunan mutu lingkungan, longsor, tersumbatnya drainase. Termasuk perubahan budaya atau perilaku penghuni baru yang dapat mengubah tata peradaban masyarakat asli, misalnya hilangnya nilai nilai kegotongroyongan.

Pengusaha perumahan kebanyakan tidak lengkap menyediakan fasilitas permukiman yang lain. Misalnya sarana peribadatan, sekolah, area terbuka atau area bermain, sampai masalah pemakaman. Jelas hal ini akan membebani lingkungan semula yang cukup tenteram.

Pembangunan permukiman baru seharusnya dipandang sebagai proyek yang memerlukan studi mendalam sampai AMDAL. Namun AMDAL hanya diterapkan pada proyek proyek besar yang diperhitungkan mempunyai dampak penting, seperti yang dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan AMDAL. Inilah kelemahan institusi kita. Banyak proyek permukiman kecil yang lolos dari keharusan mengerjakan studi AMDAL, tetapi proyek tersebut sangat banyak jumlahnya, maka dampaknya pun akan meluas.

Hambatan lain yang ada adalah masalah administrasi. Misalnya mengenai IMB (ijin mendirikan bangunan). Pemerintah kota biasanya sangat ketat dalam pemberian IMB, tetapi pemerintah luar kota kurang control terhadap perkembangan wilayahnya. Hal ini memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah, yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi lingkungan. Apalagi bila perumahan dibumbui dengan praktek persekongkolan antara pengusaha dan penguasa.

Percepatan penyebaran permukiman di luar kota tak lepas dari sistim transportasi. Saat ini masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan kendaraan pribadi, hal ini memungkinkan masyarakat untuk memilih lokas permukiman, sejauh cukup mudah untuk menjangkaunya dengan kendaraan pribadi. Kajian transportasi juga kurang komprehensif, penambahan jumlah kendaraan tak diimbangi dengan penambahan prasarananya, seperti panjang dan luas jalan, pengontrolan kelaikan kendaraan, sampai moralitan dan kedisiplinan pemakainya. Kesadaran masyarakat dalam mengoperasikan kendaraan masih lemah.

Kecenderungan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha perumahan untuk mengubah lahan lahan pertanian di sekitar kota, meskipun perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun sudah diatur dengan peraturan-peraturan yang ketat, namun terobosan-terobosan oleh para pengusaha sering berhasil mendapatkan area permukiman baru. Dengan terbangunnya kawasan permukiman, menyebabkan area pertanian disekitarnya menjadi terdegradasi kualitasnya, misalnya pengairan yang terhambat, limbah-limbah permukiman yang mengganggu, penghalangan sinar matahari pada tanaman pertanian. Keadaan ini mendorong pula perubahan fungsi area pertanian tersebut menjadi area permukiman lagi, dengan alasan area pertanian itu sudah tidak produktif lagi.

Tinjauan dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa lahan disekitar permukiman baru sulit dipertahankan sebagai area pertanian, karena pemiliknya sulit memperoleh pendukung pertanian, misalnya tenaga kerja (buruh tani) yang semakin langka. Generasi muda sangat jarang yang tertarik untuk bekerja di bidang pertanian, karena profesi ini tidak menjanjikan masa depan yang baik. harga pupuk yang sering dipermainkan tengkulak, harga jual hasil pertanian yang tidak terjamin, gangguan gangguan yang semakin bervariasi seperti kenakalan remaja, pencurian, dan hama tanaman; kemudian dirangsang oleh kenaikan harga tanah yang menarik, menyebabkan pemilik lahan tergoda untuk menjual lahan pertanian tersebut.

Dengan harga jual yang tinggi, pemilik lahan mempunyai pandangan untuk alih profesi, seperti pedagang atau pengusaha. Namun pertimbangan untuk menciptakan permukiman baru sering tidak lengkap, dengan berbagai alasan jangka pendek yang cukup masuk akal, misalnya untuk mencukupi kebutuhan perumahan yang sangat mendesak.

Jadi semakin maju peradaban manusia, semakin kompleks pemikiran maupun keperluan hidupnya; semakin tinggi standar yang diperlukan, semakin

besar energi yang diperlukan; dan semakin kritis terhadap berbagai gangguan dan hambatan yang dihadapi, seperti mengenai kualitas unsur lingkungan serta keamanannya.

SOLUSI

Menghadapi perkembangan wilayah perkotaan tersebut pemerintah harus memikirkan pendapatan masyarakat di daerah. Salah satu tinjauan perencanaan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pengejawantahannya juga terlihat pada peningkatan pendapatan daerah (Suwardjoko, 1984, hal 63). Bila masyarakat senang tinggal di daerah, maka hal ini akan mengurangi urbanisasi yang berarti juga mengurangi beban yang harus ditanggung oleh perkotaan.

Pemerintah harus mempunyai perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan tenaga kerja khususnya dari generasi muda. Karena kalau semua generasi muda tidak ada yang berminat pada bidang pertanian, maka negeri kita dapat kehilangan jati diri sebagai negara maritim/agraris yang sesuai dengan kondisi alam kita. Tidak hanya mengejar kemajuan teknologi belaka, Amerika Serikat dapat ditiru, industri dan teknologi sangat maju tapi pertanian dan kelautannya juga maju. Jadi dapat menyediakan sumber daya alam secara komprehensif.

Pengendalian jumlah penduduk harus lebih digiatkan lagi. Pengamatan sekilas menunjukkan bahwa perkembangan penduduk perdesaan sangat pesat, padahal sumberdaya manusia yang terlahir pada umumnya mempunyai kualitas yang kurang berbobot, kebanyakan adalah pencari kerja yang belum mempunyai standar yang baik, sehingga hanya menjadi tenaga kasar atau TKI yang menderita.

Pemerintah seyogyanya mengutamakan keseimbangan pendidikan. Pendidikan harus menghasilkan tenaga trampil di segala bidang, termasuk usaha yang tumbuh di perdesaan, seperti kerajinan, pertanian, peternakan dan sebagainya. Termasuk peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Kusnadi, 1986)

Sudah dirasa sangat perlu adanya koordinasi perencanaan wilayah antara kota dan wilayah sekitarnya. Pemerintah kota dan wilayah di sekitarnya harus bekerja sama untuk mewujudkan kondisi tata ruang dan lingkungan yang baik dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aca Sugandhy. 1999. *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eko Budhiardjo dan Sudanti. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Chafid Fandeli. 1988. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Yayasan Pembina Fak. Kehutanan UGM.
- Emil Salim. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Endes N. Dahlan. 1992. *Hutan Kota*. Jakarta: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.
- Gunarwan Suratmo. 1993. *Anailisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- _____. 1988. *Hari Depan Kita Bersama*. (edisi terjemahan oleh Bambang Sumantri dari Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan). Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. 1931. *Monumenten Ordonantie 1931* (Stbl. No. 238. 1931). Cipanas: Pemerintah Hindia Belanda.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1986. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Sudharto P. Hadi. 1997. *Aspek Sosial AMDAL*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suprihadi Sastrosupeno. 1984. *Manusia, Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widianarko. 1998. *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suwardjoko Warpani. 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Widjaya AW. 1985. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta.
- _____. 1995. *Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta Selatan. 1993-2013, Rencana*. Surakarta: Bappeda Kotamadya Surakarta.